

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Fenomena kekerasan pada anak di Indonesia secara umum masih tergolong tinggi, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di lingkungan pendidikan dengan berbagai bentuk dan motif yang melatarbelakanginya. Sebagaimana dikemukakan Sulaeman dan Homzah (dalam Wandari, 2015, hlm. 1) bahwa secara umum fenomena kekerasan pada anak akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol. Hal tersebut bukan hanya disebabkan oleh semakin beratnya kasus kekerasan yang dialami anak, tetapi juga karena intensitasnya pun semakin mengkhawatirkan. Fenomena tersebut tentu tidak dibenarkan, anak-anak seharusnya dididik untuk menjadi warga negara yang baik, berkarakter serta berbudaya tinggi dengan penuh penghargaan sebagai karunia Tuhan maupun sebagai generasi emas bangsa ini, terutama yang terjadi di lingkungan pendidikan.

Terlepas dari hal tersebut, manusia dan pendidikan pada dasarnya merupakan dua hal yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Secara umum, pendidikan menjadi proses yang penting dalam kehidupan manusia. Sebagaimana dikemukakan Driyakarya (dalam Aziz, 2016, hlm. 136) bahwa pada dasarnya tanpa pendidikan, manusia tidak akan sampai pada fase kemanusiawianya. Oleh karena itu, terdapat istilah bahwa manusia adalah *animal educandum* yakni makhluk yang harus di didik dan/atau *animal educable* yakni makhluk yang dapat dididik.

Fase kemanusiawian pada manusia tersebut yang kemudian membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Sehingga, tidak berlebihan jika proses pendidikan disebut sebagai proses untuk memanusiakan manusia atau proses humanisasi. Proses yang menjadikan manusia bukan hanya mengenal siapa dirinya, tetapi menjadikan manusia sebagai makhluk yang memiliki derajat, berkebudayaan tinggi, memiliki etika, norma, atau menjadi *homo* yang juga *human*. Sehingga pada dasarnya proses pendidikan bukan hanya bertujuan untuk mengembangkan aspek kognitif, namun juga aspek lainnya dalam diri siswa.

Fan (dalam Muchtarom, Dasim, dan Ace, 2016, hlm. 147) mengemukakan bahwa dalam hal ini proses pendidikan harus mampu mengembangkan dan mampu mengintegrasikan segala aspek pada diri siswa. Sehingga dalam hal ini siswa bukan hanya dididik untuk menjadi manusia yang cerdas, namun juga menjadi manusia yang lebih baik lagi

Reni Mulyani, 2019

PERANAN PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN ANTI KEKERASAN DI SEKOLAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dalam segala aspek. Peran penting pendidikan pada dasarnya bukan hanya bagi individu saja, melainkan juga bagi suatu bangsa. Sebagaimana dikemukakan Muhardi (2004, hlm. 491) yang mengatakan bahwa pada dasarnya semua negara maju di dunia ini mentikberatkan kemajuan bangsa dan negaranya atau dalam hal ini keberhasilan pembangunan bangsa dan negaranya pada sektor pendidikan. Menurut Muhardi bahwa hal tersebut mempertegas peran penting sektor pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas bangsa dan negara.

Mengacu kepada uraian sebelumnya, Assegaf (dalam Saptarini, 2009, hlm. 1) menyatakan bahwa dalam hal ini secara tersirat lembaga pendidikan memiliki fungsi untuk dapat menumbuh-kembangkan peserta didik ke dalam tingkat yang normatif lebih baik. Lebih lanjut dikemukakan Assegaf bahwa proses tersebut harus ditempuh melalui cara atau jalan yang baik, serta dalam konteks yang positif. Hal tersebut tentu berkaitan dengan pembentukan karakter siswa sebagai generasi penerus bangsa agar memiliki karakter warga negara yang baik dan dengan cara-cara yang baik pula. Proses tersebut pada dasarnya dapat diintegrasikan dalam materi pembelajaran di kelas, maupun penciptaan budaya positif di luar kelas seperti budaya saling menghargai, mengucapkan salam, pembiasaan solat, dan lain sebagainya.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa salah satu fenomena kekerasan pada anak terjadi juga di lingkungan pendidikan. Berkaitan dengan kekerasan pada anak di lingkungan pendidikan, fenomena tersebut seakan tidak dapat dilepaskan dengan dunia pendidikan di Indonesia. Jika menengok ke belakang, fenomena kekerasan pada anak di sekolah sering dikaitkan dengan masa penerimaan peserta didik baru atau dikenal dengan masa orientasi siswa. Proses tersebut seakan lekat dengan citra kekerasan yang dilakukan oleh kakak kelas kepada siswa baru. Berbeda dengan saat ini, seiring dengan perkembangan zaman, fenomena tersebut pun seakan menjadi semakin beragam, baik dari segi faktor, pelaku, maupun bentuk kekerasan itu sendiri.

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2016, hlm. 1) bahwa pada tahun 2015 berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Internastional Center for Research on Women (ICRW)*, sebanyak 84% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Kemudian menurut Komisi Perlindungan Anak (kpai.go.id, 2017) berdasarkan data pengaduan yang dihimpun dari beberapa sumber data seperti pengaduan langsung, pemantauan media cetak dan online, pengaduan online bank data perlindungan dan berdasarkan data dari

Reni Mulyani, 2019

PERANAN PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN ANTI KEKERASAN DI SEKOLAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

lembaga mitra KPAI se-Indonesia, kasus kekerasan pada anak yang terjadi di bidang pendidikan antara tahun 2011 s/d 2016 menempati urutan ketiga setelah keluarga dan pengasuhan alternatif dengan jumlah pengaduan sebanyak 2.496 kasus. Kemudian 3849 kasus terjadi pada tahun 2017. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tren kekerasan yang dilakukan oleh guru maupun siswa pada 2017 adalah kekerasan fisik dan non-fisik.

Kota Bandung sebagai kota layak anak pun tidak lantas menjadi kota dengan nol kasus kekerasan pada anak. Yang mana, Kepala UPT P2TP2A Kota Bandung (tribunjabar.com, 2018) menyatakan bahwa

Laporan kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan pada tahun 2018. Pada tahun 2017 hanya ada 65 laporan, pada tahun 2018 berdasarkan rekap data dari Januari-Juli, ada sekitar 71 laporan dengan laporan terbanyak adalah kekerasan anak, seperti *bullying*, pemerkosan, sodomi.

Pada Agustus 2018 bahkan terjadi kasus perundungan oleh teman sebaya di salah satu sekolah dasar di Kota Bandung yang dilakukan di dalam kelas.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Bidang Pendidikan, Retno Listyarti (Vivanews, 2018) menyatakan bahwa kekerasan di sekolah dengan dalih mendisiplinkan menjadi tren kasus kekerasan anak di lembaga pendidikan selama April-Juli 2018 yang berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak. Hal tersebut salah satunya terjadi di Batam pada September 2018, yang mana dalam mendisiplinkan siswanya, sistem yang diterapkan adalah sistem semi militer. Selain itu juga disediakan ruang tahanan sebagai tempat untuk menghukum siswa yang melakukan kesalahan.

Menurut Retno Listyarti (Kompasnews, 2018) fenomena tersebut tentu sangat tidak dibenarkan dalam sistem pendidikan negeri ini. Zaini dan Agustina (2016, hlm. 387) menyatakan bahwa fenomena kekerasan pada anak di sekolah terjadi karena dalam hal ini guru masih berpandangan bahwa “kekerasan” yang dilakukan, baik di sengaja ataupun tidak dapat memicu lahirnya spirit dan kemauan belajar siswa. Sehingga menurut Zaini dan Agustina proses pembelajaran di kelas dilakukan melalui pendekatan *threats of violence*. Terkait dengan kekerasan pada anak di sekolah, dalam hal ini Assegaf (2004) mengemukakan beberapa asumsi untuk menganalisis fenomena tersebut, sebagaimana berikut ini

Ada beberapa asumsi yang dapat diajukan terkait aksi kekerasan dalam dunia pendidikan. *Pertama*, kekerasan dalam pendidikan bisa

Reni Mulyani, 2019

PERANAN PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN ANTI KEKERASAN DI SEKOLAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

muncul sebagai akibat adanya pelanggaran yang disertai hukuman, terutama fisik. *Kedua*, kekerasan dalam pendidikan bisa diakibatkan oleh buruknya sistem dan kebijakan yang berlaku. *Ketiga*, kekerasan dalam pendidikan mungkin juga dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan tayangan media massa. *Keempat*, kekerasan bisa jadi merupakan refleksi dari perkembangan kehidupan masyarakat yang mengalami pergeseran cepat, sehingga meniscayakan timbulnya sikap *instant solution* atau jalan pintas. *Kelima*, kekerasan dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi pelaku. (Hlm. 3-4).

Mengacu kepada pendapat Zaini dan Agustina serta Assegaf, fenomena kekerasan khususnya dalam sistem pendidikan di Indonesia seakan sudah mendarahdaging. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, hal tersebut seperti terjadi dalam penerimaan siswa baru. Seringkali diperlakukan dengan tidak manusiawi dan tidak jarang disertai kekerasan berupa bentakan, cacian, dan hukuman fisik serta non fisik lainnya yang dilakukan oleh senior. Hal tersebut diperkuat dengan semakin bergesernya pola pikir dan/atau perilaku masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang secara tidak langsung berdampak pula terhadap tumbuhnya budaya kekerasan pada anak melalui tontonan-tontonan yang disajikan.

Berkaitan dengan fenomena kekerasan di lembaga pendidikan, kita pun tidak dapat memungkiri bahwa saat ini fenomena tersebut bukan hanya dilakukan oleh guru kepada siswa, namun juga oleh siswa kepada guru. Beberapa waktu terakhir, dunia pendidikan di negeri ini dikejutkan oleh beberapa pemberitaan yang kemudian menjadi viral terkait tindakan amoral siswa yang tega menganiaya gurunya hingga mengakibatkan cedera fisik sampai meninggal dunia. Sebagaimana dimuat dalam artikel dalam jaringan Tribunnews (tribunnews.com, 2018) bahwa “tidak kurang dari 5 kasus siswa menganiaya guru secara berturut-turut dari mulai memukul menggunakan meja bahwa menganiaya hingga mengakibatkan meninggal dunia”.

Berdasarkan pemberitaan di laman tersebut, pada Februari 2018 seorang guru salah satu sekolah di Sampang, Madura meninggal dunia setelah dipukul di bagian pelipis oleh salah seorang muridnya karena tidak terima ditegur. Sedangkan pada Juni 2017 salah seorang guru SMA di Kalimantan Barat dipukul oleh salah seorang muridnya menggunakan kursi karena tidak terima tidak naik kelas. Berdasarkan pantauan dari tribunnews tersebut, fenomena tindak kekerasan di sekolah bukan hanya dilakukan siswa sekolah menengah saja, namun juga siswa sekolah dasar.

Reni Mulyani, 2019

PERANAN PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN ANTI KEKERASAN DI SEKOLAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Fenomena demikian tentu menjadi paradoks tersendiri di dunia pendidikan. Yang mana, masyarakat modern menuntut bahwa sebagian tugas pendidikan dijalankan oleh institusi yang disebut sekolah (Lestari, 2017, hlm. 267). Sekolah dalam hal ini adalah lembaga yang diberikan amanat untuk mewujudkan proses pendidikan secara formal. Oleh karena itu, proses pendidikan yang ada harus dijalankan serta diarahkan kepada pencapaian potensi manusia secara maksimal. Sehingga kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan dapat terjaga, terpelihara, dan termanifestasi dalam kehidupan nyata. Akan tetapi, hal tersebut seakan berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada saat ini.

Mengacu kepada uraian sebelumnya maka dalam hal ini proses internalisasi nilai-nilai anti kekerasan di lembaga pendidikan menjadi salah satu hal yang penting dan harus segera dilakukan dengan komitmen penuh dari berbagai pihak. Hal tersebut agar siswa memiliki karakter anti kekerasan dan cinta damai yang kelak dapat dimanifestasikan dalam kehidupan di masyarakat. Sebagaimana dikemukakan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* yang selanjutnya disingkat UNESCO (dalam Latifah, 2015) yang menegaskan bahwa tindak kekerasan merupakan hal yang pada dasarnya dapat dihindari, berbeda dengan perselisihan. Sehingga menurut UNESCO, melalui pendidikanlah nilai-nilai anti kekerasan atau nilai-nilai perdamaian dalam diri siswa harus terus ditanamkan bukan saja saat berada di tingkat dasar, namun juga pada tingkat perguruan tinggi. Diharapkan nilai-nilai tersebut dapat dipraktikkan dalam kehidupan di masyarakat.

Vita (2014, hlm. 18) mengemukakan bahwa “jika pendidikan juga merupakan cerminan dari situasi masyarakat, maka tentu saja perubahan lingkungan sosial menuju lingkungan sosial yang damai menjadi sangat mendesak untuk dilakukan”. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan Lickona (1991, hlm. 14) bahwa setidaknya ada sepuluh hal yang harus diwaspadai jika tidak ingin para remaja sebagai penerus bangsa menuju jurang kehancuran. Salah satu dari kesepuluh hal tersebut adalah tindakan kekerasan dan pengrusakan. Mengacu kepada uraian tersebut serta kepada fenomena di sekolah yang telah diuraikan sebelumnya maka sangat jelas bahwa internalisasi nilai-nilai anti kekerasan pada siswa di sekolah harus segera dilakukan dengan didukung oleh komitmen yang kuat dari berbagai pihak. Internalisasi nilai-nilai anti kekerasan pada siswa di sekolah atau dalam hal ini disebut dengan pendidikan anti kekerasan di sekolah, bertujuan agar siswa memiliki karakter anti kekerasan dan/atau cinta damai untuk kelak dapat

diejawantahkan dalam perilaku atau sikap dalam kehidupan di masyarakat.

Karakter anti kekerasan dan/atau cinta damai yang menjadi tujuan dalam pendidikan anti kekerasan ini sebagai salah satu pilar dalam pendidikan karakter. Sebagaimana dikemukakan Zubaedi (2015, hlm. 72) bahwa setidaknya terdapat beberapa karakter yang menjadi pilar pendidikan karakter di Indonesia, yang salah satunya adalah karakter persatuan, cinta damai, dan toleransi. Proses pembentukan karakter pada dasarnya harus dilakukan secara komprehensif baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Di lingkungan sekolah, proses tersebut harus dilakukan di semua jenjang pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi yang bukan hanya dilakukan dalam proses pembelajaran di kelas saja namun juga di luar kelas melalui penciptaan budaya sekolah yang kondusif.

Terlepas dari hal tersebut, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan yang diatur dalam regulasi hukum. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak disebutkan bahwa

Sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

Tujuan sekolah ramah adalah terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah bagi perkembangan potensi anak, mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab pada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerja sama untuk kemajuan dan semangat perdamaian, tanpa diskriminasi dan kekerasan Tujuan tersebut kemudian diwujudkan dalam beberapa hal seperti dalam prinsip penyelenggaraan sekolah ramah anak yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, perkembangan, penghormatan terhadap pandangan anak, dan pengelolaan yang baik. Inti dari penyelenggaraan sekolah ramah anak adalah. Selain itu juga

Reni Mulyani, 2019

PERANAN PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN ANTI KEKERASAN DI SEKOLAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

diwujudkan dalam indikator-indikator penyelenggaraan sekolah ramah anak. Indikator-indikator tersebut meliputi 6 (enam) komponen penting, yaitu kebijakan sekolah ramah anak (SRA), pelaksanaan kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak, sarana dan prasarana SRA, dan partisipasi anak, orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, serta alumni.

Seiring dengan digulirkannya kebijakan sekolah ramah anak, banyak sekolah yang kemudian menerapkan kebijakan tersebut dan mengintegrasikan program atau kebijakan yang ada ke dalam program atau kebijakan untuk mewujudkan sekolah ramah anak, salah satunya adalah SMAN 15 Bandung. Di Jawa Barat sendiri, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017, menginstruksikan kepada seluruh sekolah di Jawa Barat untuk menerapkan program sekolah ramah anak. Meski demikian, SMAN 15 Bandung sendiri sudah sejak lama menerapkan kebijakan sekolah ramah anak ini dan secara legalitas terhitung sejak 2014 lalu.

Legalitas penerapan kebijakan sekolah ramah anak di SMAN 15 Bandung adalah berdasarkan Surat Keputusan Kelurahan Sarijadi No. 17 Tahun 2014 tentang kelompok kerja sekolah ramah anak (Pokja SRA) Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Kemudian pada bulan Maret 2015 SMAN 15 Bandung secara resmi mendeklarasikan komitmen sebagai sekolah ramah anak. SMAN 15 Bandung dalam hal ini adalah sebagai pionir sekolah ramah anak di Jawa Barat.

Berdasarkan pertimbangan dari latar belakang penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, hal tersebut kemudian menjadi motivasi bagi peneliti untuk dapat mengkaji lebih mendalam mengenai peranan sekolah ramah anak ini dalam pendidikan anti kekerasan. Hal tersebut kemudian diwujudkan dalam judul penelitian **“Peranan Program Sekolah Ramah Anak dalam Mewujudkan Pendidikan Anti Kekerasan di Sekolah (Studi Deskriptif di SMAN 15 Bandung)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian ini yaitu mengenai bagaimana peranan kebijakan sekolah ramah anak dalam mewujudkan pendidikan anti kekerasan di sekolah. Mengingat masih kompleksnya fokus penelitian tersebut, maka diperlukan adanya pembatasan masalah yang bertujuan untuk memudahkan peneliti memecahkan permasalahan tersebut. Maka dalam hal ini peneliti

Reni Mulyani, 2019

PERANAN PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN ANTI KEKERASAN DI SEKOLAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

merumuskannya dalam rumusan masalah penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program sekolah ramah anak di SMAN 15 Bandung?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program sekolah ramah anak di SMAN 15 Bandung?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program sekolah ramah anak di SMAN 15 Bandung?
4. Bagaimana peranan program sekolah ramah anak dalam mewujudkan pendidikan anti kekerasan di SMAN 15 Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan melakukan kajian secara ilmiah mengenai peranan program sekolah ramah anak dalam mewujudkan pendidikan anti kekerasan di sekolah. Sedangkan secara khusus, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengidentifikasi:

1. Pelaksanaan program sekolah ramah anak di SMAN 15 Bandung.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sekolah ramah anak di SMAN 15 Bandung.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program sekolah ramah anak di SMAN 15 Bandung.
4. Peranan program sekolah ramah anak dalam mewujudkan pendidikan anti kekerasan di SMAN 15 Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat dari Segi Teori

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran ilmiah dalam bidang pendidikan berupa informasi baik itu berupa data, fakta, maupun konsep khususnya bagi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu keilmuan yang multidisipliner. Mengingat bahwa salah satu kompetensi dasar dalam Pendidikan Kewarganegaraan adalah karakter atau watak kewarganegaraan, sehingga dalam hal ini penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran ilmiah khususnya terkait dengan pembentukan karakter anti kekerasan pada siswa di sekolah.

Selain itu diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Sehingga hal-hal yang terungkap dalam penelitian ini khususnya mengenai internalisasi nilai-nilai anti kekerasan

Reni Mulyani, 2019

PERANAN PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN ANTI KEKERASAN DI SEKOLAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

di sekolah untuk membentuk karakter anti kekerasan dan/atau cinta damai pada siswa dapat terus berkembang sebagai salah satu pengetahuan yang harus terus dikembangkan.

1.4.2 Manfaat dari Segi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar pertimbangan dalam pembuatan regulasi hukum serta kebijakan pendidikan oleh pemangku kebijakan dalam rangka menghapuskan tindak kekerasan di lingkungan sekolah yang saat ini seakan menjadi kompleks dan mengembalikan fungsi lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah ke dalam fungsi normatifnya yaitu untuk menumbuhkan kembangkan potensi anak ke arah yang normatif lebih baik, dengan cara atau jalan yang baik.

1.4.3 Manfaat dari Segi Praktik

Ditinjau dari segi praktik, penelitian ini diharapkan mampu:

- a. Mendapatkan gambaran berupa informasi, data, fakta mengenai peranan program sekolah ramah anak dalam mewujudkan pendidikan anti kekerasan di sekolah
- b. Dijadikan sebagai dasar bagi pendidik, tenaga kependidikan untuk senantiasa menerapkan prinsip-prinsip pendidikan yang ramah anak, pendidikan anti dan/atau tanpa kekerasan di sekolah yang pada dasarnya sesuai dengan hakikat pendidikan itu sendiri sebagai proses memanusiakan manusia.
- c. Dijadikan sebagai rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan fokus penelitian ini
- d. Memberikan pengalaman nyata dari proses penelitian, menambah ilmu dan wawasan bagi peneliti mengenai program sekolah ramah anak dan pendidikan anti kekerasan itu sendiri, dan khususnya mengenai peranan sekolah ramah anak dalam mewujudkan pendidikan anti kekerasan di sekolah.

1.4.4 Manfaat dari Segi Isu serta Aksi Sosial

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada berbagai pihak khususnya pihak yang terjun langsung dalam sistem pendidikan. Sehingga dapat menjadi bahan masukan dalam menginternalisasikan nilai-nilai anti kekerasan pada siswa, mengembalikan hakikat pendidikan dan menghapuskan mata rantai tindak kekerasan pada anak di sekolah yang tidak sesuai dengan hakikat dan tujuan pendidikan dan konvensi hak anak.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Penyusunan skripsi ini terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian dan bebas plagiarisme,

Reni Mulyani, 2019

PERANAN PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN ANTI KEKERASAN DI SEKOLAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

halaman ucapan terima kasih, nama dan kedudukan tim pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, isi, daftar pustaka, dan daftar lampiran. Sistematika penulisan di dalam penyusunan skripsi ini meliputi lima bab, yang terdiri dari:

- BAB I : Pendahuluan. Peneliti pada bab ini menguraikan beberapa hal yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi
- BAB II : Kajian Teori. Bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dan mendukung penelitian ini.
- BAB III : Metode Penelitian. Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, partisipan dan objek penelitian, prosedur penelitian, teknik dan alat pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data mengenai peranan program sekolah ramah anak dalam mewujudkan pendidikan anti kekerasan di sekolah.
- BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi deskripsi hasil penelitian dan juga pembahasan hasil penelitian yang dikomparasikan dengan teori-teori yang mendukung pada bab 2.
- BAB V : Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi. Pada bab ini peneliti memberikan simpulan dari penelitian ini yang terdiridari simpulan umum dan khusus, menguakan implikasi penelitian dan juga merekomendasikan hal-hal tertentu berdasarkan hasil penelitian ini kepada pihak-pihak yang terkait.